

UPAYA KEPALA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA RESANG KECAMATAN SINGKEP SELATAN KABUPATEN LINGGA

Sarina¹, Jamhur Poti², Edison³

Sarinaips1@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

The Village Head is the organizer and at the same time responsible for the running of the government and development in the area. In addition to carrying out government and development affairs, the Village Head (Kades) also has another obligation, which is to carry out community affairs in fostering the peace and order of the community and fostering and developing the soul and spirit of community cooperation. The development carried out in Resang Village is a realization of national development. To support development in Resang Village, the participation of the government and participation of all levels of society is needed. In realizing development goals, all natural potential must be explored, developed, and utilized as well as possible, as well as human resources must be further improved so that they can develop natural potential to the maximum so that development goals can be achieved. The purpose of this study was to determine the efforts of village heads and community participation in the development of Resang Village, Singkep Selatan Subdistrict, Lingga Regency. In this study, the writer used a descriptive qualitative research. The information was taken from the village government and community leaders. Data analysis technique used in this research is descriptive qualitative data analysis technique. Based on the results of the study it can be analyzed that the efforts of the Village Head and Community Participation in the Development of Resang Village, Singkep Selatan Subdistrict, Lingga Regency have not been running optimally. Another problem is that in the implementation of the Village Head's Efforts in Development it was found that encouragement to mobilize the community to participate in supporting existing programs was carried out but not yet fully carried out.

Keywords: Village Head, Development, Village

I. Pendahuluan

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya kepala desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupten Lingga. Tujuan pembangunan yang di laksanakan pada prinsipnya untuk menuju masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang merupakan hasil konsensus kita bersama. Pembangunan merupakan tujuan dari kehidupan Negara, dan di harapkan pembangunan masyarakat seluruhnya, agar masyarakat dan Negara termasuk

¹ Masiswi Program Studi Administrasi Negara FISIP UMRAH

² Dosen Pembimbing Pertama

³ Dosen Pembimbing Kedua

didalamnya, masyarakat Desa dan Kabupaten agar tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupannya. Masyarakat di Desa Resang harus diberikan arahan demi kelangsungan pembangunan, dilakukan dengan cara melakukan pemberdayaan yang lebih menitik beratkan kepada swadaya masyarakat serta potensi yang ada. Sangat perlu dilakukan oleh pemerintah, dalam rangka menunjang kegiatan nyata yang dilaksanakan. Mewujudkan tujuan program pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksud agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu yang dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan. Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan. Dalam hubungan ini, maka Kepala Desa sebagai pemegang peranan yang menentukan sebagai pemimpin tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengembangkan tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait-mengait termasuk tugas pembangunan yang multi dimensional. Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Resang merupakan realisasi pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan di Desa Resang peran serta pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan. Dalam merealisasi tujuan pembangunan maka segenap potensi alam harus di gali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, demikian pula halnya sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan sehingga dapat mengembangkan potensi alam secara maksimal agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

Sinambela (2010:63) mengemukakan bahwa pemerintah secara administarsi adalah jajaran aparatur Negara dari berbagai satuan kerja baik yang berada dipusat yang disebut pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengelolaan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah merupakan kewajiban dalam menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa, dengan kata lain jika pemerintah tidak dapat menjalankan pemerintah dengan baik maka akan mengakibatkan keterpurukan bagi keberlangsungan bangsa dan Negara. Pemerintah adalah abdi Negara yang selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa. (Pranoto, 2006:1). Lain halnya dengan Rush dan Althoff (2002:129) adanya hierarki mencakup seluruh jajaran partisipasi politik dan untuk dapat diterapkan pada semua tipe sistem politik. Adalah penting juga untuk kita sadari bahwa partisipasi pada suatu tingkatan yang lebih tinggi, walaupun mungkin hal ini berlaku bagi tipe-tipe partisipasi tertentu. Pada puncak hierarki terdapat orang-orang yang menduduki berbagai macam jabatan dalam sistem politik, baik pemegang-pemegang jabatan politik maupun anggota-anggota birokrasi pada berbagai tingkatan. Menurut Kaho (2002:40), partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat tahap yaitu: 1). Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, 2). Partisipasi dalam bentuk pelaksanaan, 3). Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, 4). Partisipasi dalam mengevaluasi.

Todaro (2000:218) berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu dalam menunjang kelancaran pengembangan dan perkembangan suatu daerah karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai cenderung dalam proses pembangunan akan terlambat, bahkan hasilnya akan kurang optimal.

Adapun yang menjadi prioritas pemerintah Desa Resang Kabupaten Lingga saat ini, dalam membangun infrastruktur yang merata dan menyeluruh. Namun masih ada program Desa berupa pembangunan yang belum bisa diselesaikan seperti semenisasi lapang voli, pembangunan mandi cuci kakus (MCK) yang belum merata, karena masyarakat Desa Resang kebanyakan tidak mempunyai mandi cuci kakus (MCK) pribadi, mereka banyak mempunyai jamban dilaut. Hal ini disebabkan bisa mencemar dasar laut tersebut. Dan sumur umum untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat masih menggunakan sumur yang lama tidak layak pakai, disini tujuan Kepala Desa mengajak masyarakatnya kerja sama supaya pembangunan tepat sasaran dan dimanfaatkan oleh masyarakatnya dengan baik. Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan diatas maka masalah pokok yang menjadi pembahasan penelitian adalah bagaimana upaya Kepala Desa dalam pembangunan Desa Resang Kabupaten Lingga Kecamatan Singkep Selatan. Desa Resang Kabupaten Lingga di pimpin oleh Kepala Desa (Kades), Kepala Desa bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian, memelihara ketentraman dan ketertiban desa. Kemudian kewajiban Kepala Desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa, serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

II. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan yaitu deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2004:11) bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan variabel satu dengan variabel lain. Fokus penelitian ini pada upaya Kepala Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil serta evaluasi dari hasil awal pembangunan Desa Resang Kabupaten Lingga. Lokasi penelitian di wilayah Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Adapun yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan Desa Resang merupakan Desa yang baru dibentuk sebagai kecamatan, dan masih dikatakan termuda dari kecamatan-kecamatan yang ada di kabupten lingga. Serta terbatasnya partisipasi masyarakat yang berkualitas. Maka membuat ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian di Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga.

III. Hasil dan Pembahasan

Desa Resang adalah sebuah Desa yang terletak di tepi pantai yang memanjang terdapat jalan 2 jalur di Desa tersebut. Mengingat sejarah Desa Resang ini awal mula namanya Desa Marok Kecil. Desa Marok Kecil berasal dari nama suku asli terdahulu dikenal dengan nama suku "BAROK" telah berlangsung beberapa generasi. Adapun mata pencaharian penduduk yang masih mendiami kampong tersebut, bertanam/berkebun dan nelayan. Tinggi pusat pemerintah wilayah dari permukaan laut 15-25 m, suhu udara rata-rata (max-min) 30,2 C – 31,5 C. Bentuk wilayah Desa Resang datar berombak 80%, berombak sampai berbukit 20%. Dengan luas daerah ± 5001 km², keadaan budaya masyarakat Desa Resang pada umumnya terdiri dari berbagai macam suku antara lain: Melayu, Jawa, Batak, Kabaena, dan Minang. Keadaan masyarakat sampai saat ini cukup toleran baik terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan keagamaan maupun kegiatan pemerintah yang diprogramkan oleh Pemda, Kecamatan dan Desa seperti gotong royong, penyuluhan kesehatan, kebersihan lingkungan, dan lain-lainnya. Selanjutnya dilihat dari batas wilayahnya Desa resang terletak antara:

Sebelah Utara : Desa Marok Kecil

Sebelah Barat : Desa Marok Tua

Sebelah Selatan : Desa Berhala

Sebelah Timur : Desa Marok Kecil

Pembangunan Desa melibatkan banyak instansi walaupun seluruhnya menjadi kewenangan pemerintah Desa. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa, sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan

Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis BAPPEDA merupakan lembaga teknis daerah yang membantu Kepala Daerah dalam menemukan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perencanaan pembangunan di daerah.

Pembangunan Desa disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan Desa disusun partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan Desa. Peran aktif dari pemerintah Desa secara langsung dari proses pembangunan fisik Desa tersebut, dapat dituangkan dalam bentuk koordinasi sebagai salah satu fungsi manajemen pembangunan. Aparat pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah Kepala Desa. Sebagai seorang pimpinan dalam suatu Desa, Kepala Desa dituntut untuk dapat berperan dalam pembangunan fisik Desa dengan suatu team kerja yang dikoordinasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan membuat skala prioritas tentang apa yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana fisik tersebut.

Strategi pembangunan pedesaan adalah peningkatan kapasitas dan komitmen masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan, partisipasi masyarakat secara langsung dalam tiap tahap proses pembangunan adalah merupakan ciri utama pembangunan Desa yang ideal. Dalam proses pembangunan partisipasi masyarakat berfungsi sebagai masukan dan keluaran, proses partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tahap yaitu mulai dari penerimaan informasi, pemberian tanggapan terhadap informasi, perencanaan, pelaksanaan, penelitian, dan penerimaan kembali hasil. Pembangunan sebagai input atau masukan diharapkan dengan adanya partisipasi masyarakat bisa menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri, sedangkan sebagai output atau keluaran merupakan proses keluaran stimulasi atau motivasi masyarakat melalui berbagai upaya.

Dalam upaya pembangunan Desa partisipasi masyarakat mempunyai peran penting karena pembangunan Desa sebenarnya ditujukan untuk memajukan Desa itu sendiri dan memanfaatkan berbagai potensi serta sumber daya yang ada. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan maka diharapkan hasil dari pembangunan dapat sesuai dengan yang diharapkan, partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan Desa dimulai dari penerimaan informasi perencanaan, pembangunan, serta pelaksanaan program. Dengan adanya peran partisipasi masyarakat maka hasil dari pembangunan yang dilakukan nantinya diharapkan dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Untuk mencapai kesejahteraan maka dibutuhkan pembangunan infrastruktur Desa bagi masyarakat yang diwujudkan bersama-sama. Untuk mengetahui pembangunan Desa di Desa Resang maka dilakukan pengumpulan data sebagai berikut:

Perencanaan

Peran ideal pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai regulator, yaitu menyusun produk hukum. Pembangunan membutuhkan payung hukum, landasan hukum, landasan yuridis formal sampai landasan operasional. Mulai dari hulu (adanya Bappenas dan sistem penganggaran) hingga hilir (peran pengendalian/pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional), pemerintah dapat mengambil porsi yang dominan. Kegiatan pembangunan nasional dengan segala ukuran keberhasilan dan dampak positif dan negatifnya, tidak terlepas dari kerja keras dan pengabdian aparat Pemerintah Desa. Aparat pemerintah yang ada di Desa dan juga sebagai pemimpin serta penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan-perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun perubahan sosial masyarakat. Seiring dengan perkembangan dewasa ini, maka masyarakat semakin kritis dengan adanya era globalisasi

dengan bertahap. Dana yang dibutuhkan masing-masing untuk pembangunan sudah diperkirakan dengan terencana. Dana yang dibutuhkan masing-masing untuk pembangunan sudah diperkirakan dengan terencana. Wawancara dilakukan kepada Kepala Desa, berikut hasil wawancara yang didapatkan:

”perencanaan proses pembuatan keputusan sangat sesuai dengan anggaran yang ada, mengacu kepada RPJMD dulu kemudian Desa membuat rancangan pembangunan jangka menengah Desa. Tetapi tetap mengacu kepada RPJMD tersebut. Rencana kerja pembangunan Desa untuk 1 tahun kemudian turunannya menjadi APBDES terdiri dari 4 bidang yaitu pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan. 30% untuk bidang pemerintahan dan sisanya 70% untuk bidang pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan” (wawancara, Jumat 23 November 2018)

Perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan bermanfaat hasilnya jika dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Kartasamita (1996:63), pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pandangan ini menunjukkan atas demokrasi dalam konsep pembangunan nasional. Masyarakat perlu dilibatkan secara langsung bukan karena mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh kesadaran. Dalam proses pembangunan, masyarakat tidak semata-mata diperlakukan sebagai obyek, tetapi lebih sebagai subyek dan aktor atau pelaku (Soetomo, 2008:8). Dengan adanya program-program partisipatif memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka dan secara langsung juga melaksanakan sendiri serta memetik hasil dari program tersebut. Selain UU No 25 Tahun 2004 terdapat peraturan perundang-undangan lain yang menekankan perlunya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yakni: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan

Peran ideal pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai pelaksana yaitu pemerintah diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memanfaatkan hasil kemudian berpartisipasi terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan. Tingkat partisipasi pada tahap pelaksanaan merupakan tingkat partisipasi dan keaktifan informan dalam melaksanakan setiap kegiatan pembangunan yang telah direncanakan yakni dari hasil pelaksanaan pertemuan, pembentukan kelompok pelaksana, hingga proses eksekusi pembangunan yang telah direncanakan. Dana yang dibutuhkan masing-masing untuk pembangunan sudah diperkirakan dengan terencana. Wawancara dilakukan kepada Kepala Desa, berikut hasil wawancara yang didapatkan: ”perencanaan proses pembuatan keputusan sangat sesuai dengan anggaran yang ada, mengacu kepada RPJMD dulu kemudian Desa membuat rancangan pembangunan jangka menengah Desa. Tetapi tetap mengacu kepada RPJMD tersebut. Rencana kerja pembangunan Desa untuk 1 tahun kemudian turunannya menjadi APBDES terdiri dari 4 bidang yaitu pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan. 30% untuk bidang pemerintahan dan sisanya 70% untuk bidang pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan” (wawancara, Jumat 23 November 2018)

Dalam pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan dukungan masyarakat Desa sehingga pembangunan di Desa berjalan dengan optimal tanpa ada hambatan dari masyarakatnya. Pada tahap pelaksanaan pembangunan Desa melalui dana Desa diawali dengan sosialisasi pertemuan mengenai pembangunan Desa, kemudian masyarakat menghadiri kegiatan perencanaan pembangunan dan dilanjutkan dengan penentuan kelompok sebagai eksekusi dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Tahap pelaksanaan yang melibatkan masyarakat ini bertujuan agar pembangunan di Desa Resang tetap menggunakan swadaya

masyarakat agar masyarakat tahu dan mengerti untuk apa pembangunan dana Desa, serta diharapkan dapat menghasilkan output pembangunan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Wawancara dilakukan kepada Sekretaris Desa, berikut hasil wawancara yang didapat: “sampai saat ini menurut saya optimal, karena sebelum pelaksanaan pembangunan di Desa ini, musyawarah terlebih dahulu, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terlebih dahulu dan nantinya hasil akhir adalah keputusan bersama oleh Kepala Desa. Kembali lagi kepada masyarakatnya ada juga tidak mengerti dan hanya ikut-ikutan saja apa yang akan dibangun di Desa ini”(Wawancara, Rabu 21 November 2018)

Dalam tahap pelaksanaan kegiatan, Kepala Desa Resang tetap mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, walaupun dalam pelaksanaan pembangunan sudah transparan. Supaya masyarakat Desa Resang mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa mereka.

Pemanfaatan Hasil

Upaya Kepala Desa untuk membimbing masyarakatnya untuk memanfaatkan hasil pembangunan merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal berhenti, untuk terus-menerus mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu hidup, dalam situasi lingkungan yang juga terus-menerus mengalami perubahan-perubahan. Dalam proses pembangunan yang terjadi, bukanlah sesuatu yang sifatnya alami, melainkan suatu proses yang dilaksanakan dengan sadar dan terencana. Proses perubahan yang akan dilaksanakan dan ingin dicapai dalam setiap pembangunan, adalah perubahan yang menyeluruh yang mencakup beragam aspek dan tatanan kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Agar pembangunan dinilai mencapai tujuannya dari pembangunan Infrastruktur Desa.

Makna pembangunan Desa adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi itu diartikan tidak saja sebagai keikutsertaan dalam pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak Desa ataupun pihak luar Desa (outsider stakeholder) atau keterlibatan dalam upaya menyukseskan program pembangunan yang masuk ke Desanya, akan tetapi lebih dari sekedar itu. Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan Desa itu berjalan atas inisiatif dan prakarsa dari warga setempat (lokal) sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang mereka miliki. Sejalan dengan itu, segala potensi lokal betapun kecilnya tidak dapat diabaikan, karena ia akan menjadi sumber dari sebuah pembangunan. Midgiey (1995:78-79) mengemukakan ada beberapa aspek dalam pembangunan Desa, diantaranya mementingkan proses dan adanya intervensi. Dua hal tersebut perlu disoroti karena terkait dengan konsep pemberdayaan.

Suatu program pembangunan yang hanya mementingkan hasilnya untuk dipersembahkan pada masyarakat justru mengingkari martabat masyarakat, karena hal tersebut menghambat masyarakat untuk berperan serta dalam proses. Sedangkan intervensi dimaksud bahwa dalam pencapaian perubahan sosial dengan pemerataan kesejahteraan bagi semua penduduk tidak terlepas dari campu tangan pemerintah, karena pemerintah yang menguasai berbagai sumber daya (*Strategies for Social Development by Goverments*). Hal tersebut juga berkaitan dengan penumbuhan keberdayaan mereka dalam program-program pembangunan, apalagi yang memang berskala lokal dan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sudah sewajarnya didesentralisasikan pada masyarakat setempat untuk direncanakan dan dilaksanakan.

Manfaat dari hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat adalah berupa manfaat dari pembangunan infrastruktur yaitu berupa jalan-jalan di lingkungan perkampungan, parit-parit yang berguna untuk mencegah pengikisan tanah di lingkungan masyarakat apabila musim pasang terjadi atau musim hujan, wc umum guna mempermudah masyarakat yang tidak mempunyai wc pribadi di rumah, dan juga mencegah masyarakat menggunakan jamban di laut, selain itu sumur umum, dan fasilitas olahraga serta gedung serba guna. Kepala Desa mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan sampai pemanfaatan pembangunan

infrastruktur Desa yang sedang dilaksanakan, setelah dilakukan perencanaan, Kepala Desa juga harus membimbing masyarakat untuk memanfaatkan hasil yang sudah di rencanakan dan di realisasi, seperti dalam pembangunan fasilitas pemerintah membimbing masyarakat untuk memanfaatkan hasil dari pembangunan tersebut. Semua harus dimanfaatkan dan merasakan hasil dari pembangunan infrastruktur Desa, pemerintah harus merata memberi kesempatan kepada masyarakat untuk merasakan pemanfaatan hasil tersebut.

Evaluasi

Bentuk evaluasi dan pengawasan masyarakat di Desa sudah mulai sejak awal program disusun. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui program apa saja dan berapa anggaran yang dibutuhkan berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan yang akan dilakukan di Desa. Dalam tahapan pelaksanaan program selain mengawasi, masyarakat pun diajak untuk terlibat aktif baik tenaga maupun dalam hal pengawasan dan evaluasi. Berhubungan dengan pengawasan masyarakat, bentuknya seperti ketika masyarakat menemukan adanya permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan, maka masyarakat tidak menggunakan cara-cara yang kurang baik seperti yang dijelaskan dalam pengawasan tidak melembaga (pengawasan informal), tetapi masyarakat bersama-sama dengan Kepala Desa untuk duduk bersama membicarakan tentang pelaksanaan pembangunan yang mengalami kendala tersebut.

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional mempunyai arti yang strategis, di daerah pedesaan. Sehingga berhasilnya pembangunan Desa akan menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan memungkinkan peningkatan pemerataan pembangunan dan hasilnya menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur merata material dan spiritual. Oleh karena itu pemerintah memberikan perhatian terhadap pelaksanaan pembangunan Desa agar dapat memberikan hasil nyata, dalam arti adanya peningkatan taraf hidup masyarakat disuatu pihak dan pada pihak lain munculnya semangat atau gairah membangun dari masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi masyarakat. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat Desa Resang dalam pelaksanaan pembangunan Desanya maka dilakukan wawancara dengan informan. Wawancara dilakukan kepada Kepala Desa, berikut hasil wawancara yang di dapat: “pembangunan Desa kami akan membangun kalau tercantum di RPJMD dan RKPDes tahunan, dan usulan dari musyawarah bersama masyarakat. Jika ditemukan ada permasalahan dilibatkan ke BPD juga, jika terjadi perubahan kami akan menyesuaikan dengan anggaran yang ada, pembangunan akan dibangun harus sesuai dengan RPJMD jika bertentangan dengan masyarakat tidak bisa kami lakukan, kecuali sifatnya itu mutlak”(Wawancara, Jumat 23 November 2018)

Keterlibatan/pelibatan aparat Desa dengan anggota masyarakat dalam proses pembangunan mutlak adanya, karena tanpa itu maka program pembangunan yang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan tidak akan tercapai sesuai yang diharapkan. Yakni pembangunan yang berkelanjutan dan dapat mensejahterakan masyarakat. Namun pembangunan akan di bangun harus sesuai dengan aturan Desa tidak bisa apa yang di harapkan masyarakatnya. Oleh karena itu masyarakat sebagai objek dan sekaligus subjek pembangunan perlu benar-benar diperhitungkan. Diperhitungkan dalam arti masyarakat setidaknya dipercaya dan diberi tanggungjawab serta dibangkitkan semangatnya, agar turut serta dalam proses pembangunan. Sebagaimana telah diketahui bahwa pembangunan adalah perubahan kearah yang lebih baik.

Upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam mengevaluasi pembangunan sebelumnya sangat terencana, ia melihat kapasitas sebuah gedung untuk pertemuan sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakatnya dan kemajuan Desanya. Pemantauan tahapan perencanaan yang dilakukan adalah mengawali proses perencanaan dan penganggaran dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Pemantauan tahapan pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan cara menilai pengadaan barang dan jasa, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan

administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa. Inilah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Upaya Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga, maka dapat disimpulkan bahwa:

Pembangunan di Desa Resang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat belum maksimal. Kerja sama antara Kepala Desa dan masyarakat dari awal perencanaan sampai tahap evaluasi pembangunan belum menghasilkan hasil yang diharapkan oleh peneliti. Kepala Desa Resang merancang pembangunan sesuai dengan anggaran yang ada, dan yang terpenting sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Karena pembangunan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya itu sendiri. Selain itu, Kepala Desa Resang mengajak masyarakatnya untuk berpartisipasi penuh atas perencanaan pembangunan di Desa Resang. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan terlihat bahwa masyarakat Desa Resang cukup tanggap dalam memahami permasalahan di desanya. Meskipun kenyataan dalam setiap rapat musrembang lebih didominasi tokoh masyarakat. Pembangunan sangat diperlukan dukungan dari masyarakat Desa sehingga pembangunan di Desa berjalan dengan optimal tanpa ada hambatan dari masyarakatnya. Jika semua masyarakatnya ikut serta dalam partisipasi akan memberi dampak positif bagi Desa tersebut. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam memberikan sumbang tenaga dan uang. Namun pada kenyataan tidak semua masyarakat mampu memberikan partisipasi sepenuhnya biaya pembangunan diserahkan kepada pihak pemerintah.

Kepala Desa juga harus mendorong masyarakat untuk untuk memanfaatkan hasil yang sudah direncanakan dan di realisasi, seperti dalam pembangunan fasilitas pemerintah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan hasil dari pembangunan tersebut namun masyarakat masih kurang memahami pembangunan yang di Desa, pelaksanaan pembangunan Desa Resang berjalan sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Kepala Desa, tetapi masih ada masyarakat yang tidak siap menerima pembangunan di Desanya. Dikerenakan mereka tidak aktif dalam partisipasi pembangunan, dan mereka menganggap yang mengambil berat masalah pembangunan Desa itu adalah haknya Kepala Desa.

V. Daftar Pustaka

- Kaho, Josep Riwu. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rush, Michael dan Philip Althoff.(2002). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siregar, Ashadi. 2001. Teknologi Informasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Demokrasi, Makalah Seminar UGM Yogyakarta.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftha. 2007. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Todaro. 2000. *Pembangunan Ekonomi Daerah Berkeadilan*, Yogyakarta:Kurnia Kalam Semesta.